



Systematic Literature Review: Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Berdasarkan Model William N Dunn

Anastasya Nur Febiyanti^{1*}, Weni Rosdiana²

^{1,2} Program Studi D4 Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anastasya.22084@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a government assistance program aimed at poor or underprivileged communities, distributed monthly through electronic accounts and used specifically to purchase basic necessities at designated E-Warong stores. However, in reality, the implementation of the BPNT program in the field still faces comprehensive challenges, such as issues related to targeting inaccuracy and the quality of food obtained by KPM not always meeting standards. The purpose of this study is to explore the evaluation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program policy through a Systematic Literature Review (SLR) approach, so that researchers can trace various empirical findings regarding the implementation of the Non-Cash Food Assistance program policy in several regions. The policy evaluation model used is William N Dunn's model, which includes six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of this study are expected to provide a comprehensive and in-depth picture of the phenomenon being studied in an objective and systematic manner, and can be used as a reference for government agencies in evaluating and optimizing the implementation of the BPNT program policy so that it becomes a more effective and sustainable social assistance program.*

Keywords: *Evaluation Policy; Food Aid; Literature Review; Non-Cash; William N Dunn*

Abstrak. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu yang disalurkan setiap bulan melalui akun elektronik dan digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pokok di E-Warong yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, implementasi program BPNT di lapangan masih menunjukkan tantangan yang cukup komprehensif, seperti adanya isu terkait ketidaktepatan sasaran, serta kualitas bahan pangan yang didapatkan oleh KPM tidak selalu sesuai standar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), agar peneliti dapat menelusuri berbagai temuan empiris mengenai penerapan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di beberapa daerah. Adapun model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu model William N Dunn yang mencakup 6 indikator seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti secara objektif dan sistematis, serta dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan penerapan kebijakan program BPNT agar menjadi program bantuan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Pangan; Evaluasi Kebijakan; Literature Review; Non-Tunai; William N Dunn

1. LATAR BELAKANG

Di era saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi global, ketahanan pangan menjadi aspek fundamental dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam konteks kemiskinan dan kesejahteraan (Nurjanah et al., 2024). Meskipun pemerintah sudah menciptakan program perlindungan sosial untuk masyarakat, namun isu terkait kerentanan pangan masih sering muncul. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan sosial yang telah dirancang dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan. Sehingga, intervensi kebijakan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas

sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi, karena ketidakpastian ekonomi dan sosial dapat memperburuk situasi pangan. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melalui program bantuan sosial, salah satunya yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang disalurkan setiap bulan melalui akun elektronik dan digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pokok di E-Warong yang telah ditetapkan (Octavia et al., 2022). Program ini merupakan hasil transformasi kebijakan bantuan pangan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan skema konvensional seperti Rastra/Raskin menuju mekanisme penyaluran yang lebih modern dan efisien. Menurut (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023) dijelaskan bahwa tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok. Melalui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemampuan ekonomi para penerima manfaat, terutama melalui perluasan akses mereka terhadap layanan keuangan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya penanganan dan pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia.

Program BPNT disebut sebagai program non-tunai karena menerapkan sistem kartu elektronik yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat digunakan di e-warong atau agen mitra bank terdekat. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan pilihan bahan pangan, memungkinkan fleksibilitas bagi KPM dalam memilih pangan yang sesuai kebutuhan rumah tangga, serta mengurangi adanya kebocoran dalam penyaluran bantuan. Dengan melalui sistem elektronik ini, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat waktu, lebih transparan dan lebih mudah dipantau. Selain itu, melalui sistem ini, setiap KPM juga diharuskan untuk memiliki akun bank atau kartu elektronik agar dapat mendorong perilaku yang lebih produktif dari para penerima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program (Laurentcia & Yusran, 2021). Sehingga dengan meningkatnya akuntabilitas program dan tercatatnya setiap transaksi tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun pada kenyataannya, implementasi program BPNT di lapangan masih menunjukkan tantangan yang cukup komprehensif. Salah satu permasalahan utama dalam

penerapan program BPNT yaitu adanya isu terkait ketidaktepatan sasaran (targeting), seperti tidak sesuai basis data penerima BPNT terhadap kondisi ekonomis aktual penerima manfaat. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya pembaruan data secara berkala yang membuat proses verifikasi menjadi sulit dan menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan. Dengan adanya ketidaktepatan distribusi ini dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan dasar program yaitu membantu kelompok paling rentan, karena masyarakat yang memenuhi kriteria dan berhak mendapat bantuan, justru tidak memperoleh bantuan tersebut, sedangkan masyarakat yang dianggap mampu dan kurang memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima bantuan (Ramadhani & Sihombing, 2024). Sehingga kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas dari pelaksanaan program, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah.

Disamping itu, kendala lain yang sering ditemukan dalam penerapan program BPNT yaitu terkait aspek kualitas dan kuantitas bahan pangan yang diterima oleh KPM tidak selalu sesuai standar. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa daerah yang melaporkan adanya komoditas yang tidak memadai/kurang segar, serta jumlah/kuantitas yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan program (Kiswanto, 2021). Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya mekanisme pengawasan pada rantai pasok atau penyedia barang, serta proses transaksi. Selain itu, beberapa e-warong juga diduga telah melakukan praktik yang kurang etis, seperti penentuan harga yang tidak transparan kepada masyarakat. Praktik semacam ini dapat merugikan penerima serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program BPNT. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan yang kuat agar kedepannya penyedia barang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penguatan sistem pengawasan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana di lapangan, seperti pendamping sosial program dan pengelola e-warong, agar mereka lebih memahami standar operasional yang harus dipatuhi.

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pangan di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2020	18.997.348
2021	18.557.606
2022	118.018.014
2023	103.102.744
2024	73.597.540

Sumber : Data BPS Indonesia (2025).

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada rentang waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat $\pm 18,99$ juta keluarga yang menerima bantuan, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 18,56 juta keluarga. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat besar hingga 118 juta penerima, yang mengindikasikan adanya perluasan cakupan program atau penyesuaian terkait pendataan dan penyaluran bantuan. Setelah peningkatan drastis tersebut, jumlah penerima kembali menurun pada tahun 2023 menjadi $\pm 103,10$ juta keluarga dan semakin berkurang pada tahun 2024 menjadi 73,59 juta keluarga. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa implementasi program BPNT sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta mekanisme validasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, ketepatan sasaran dan keberlanjutan program BPNT menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi program BPNT tidak sepenuhnya bebas dari permasalahan. Meskipun program ini telah membawa inovasi, akan tetapi kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan masih terlihat, sehingga dibutuhkan adanya evaluasi kebijakan terhadap program BPNT. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan guna menilai sejauh mana kebijakan publik yang telah diimplementasikan sebelumnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kadji, 2015). Evaluasi kebijakan menjadi salah satu langkah penting untuk menilai efektivitas penerapan program BPNT secara menyeluruh dengan mengidentifikasi apa saja faktor yang menjadi kendala pada implementasinya. Selain itu, hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga harapannya, program BPNT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat rentan.

Meskipun beberapa penelitian tentang BPNT telah dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah, namun hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan yang beragam dan terkadang saling bertentangan. Penelitian di satu wilayah tidak dapat menggambarkan kondisi secara umum mengenai penerapan program BPNT. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan temuan penelitian yang lebih luas untuk mengetahui pola yang muncul, karena dengan melakukan perbandingan lintas penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pelaksanaan program. Sehingga diperlukan adanya analisis yang lebih mendalam untuk menyatukan berbagai temuan penelitian yang sudah dilakukan dengan

menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi temuan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kendala dalam implementasi program BPNT.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, agar peneliti dapat menelusuri berbagai temuan empiris mengenai penerapan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di berbagai daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan penerapan kebijakan program BPNT agar menjadi program bantuan sosial yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yaitu metode yang digunakan untuk menemukan, menilai dan menafsirkan temuan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian spesifik, bidang topik, atau fenomena yang sedang diperhatikan (Watajdid et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu untuk memberikan wawasan mendalam tentang evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melalui analisis terhadap berbagai temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti dari beberapa Jurnal atau Artikel Ilmiah yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini model evaluasi kebijakan yang digunakan adalah model William N Dunn yang mencakup 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sehingga, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti secara objektif dan sistematis.

Menurut (Khan, 2003) dalam (Musdary et al., 2021) menjelaskan bahwa penelitian *Systematic Literature Review* dilaksanakan dengan melalui 5 tahapan yang meliputi:

Perumusan pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu :

RQ 1 : Artikel terindeks jurnal apa saja

RQ 2 : Metode penelitian apa yang paling banyak digunakan

RQ 3 : Apakah artikel membahas tentang evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai

RQ 4 : Apakah Bantuan Pangan Non Tunai memberikan dampak kepada masyarakat yang menerimanya

Pengumpulan literatur

Proses pencarian literatur atau artikel dilakukan melalui pencarian pada database Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci “Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, serta membatasi hasil pencarian pada artikel yang terbit pada tahun 2021-2025.

Reduksi atau penyaringan artikel

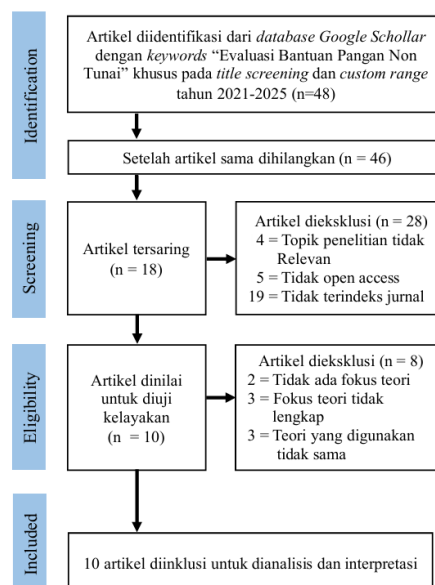
Penilaian terhadap artikel-artikel yang telah dikumpulkan kemudian dinilai kelayakannya. Setiap artikel yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria tertentu akan dieliminasi.

Analisis sistematis

Artikel yang terpilih dan dianggap layak selanjutnya akan dianalisis secara sistematis, melakukan perbandingan serta menyusun ringkasan dari hasil analisis tersebut.

Penyajian hasil

Menginterpretasikan artikel yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan menyajikannya dalam bentuk hasil *Systematic Literature Review*.



Gambar 1. Bagan alir proses eksklusi dan inklusi artikel dalam tahapan *systematic literature review* (n = jumlah artikel).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

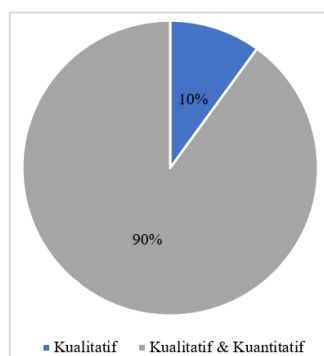
Hasil

P1 : Artikel terindeks 10 jurnal yang berbeda

Tabel 2. Identitas Jurnal.

Nama Jurnal	Jumlah
Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi	1
Unigal Repository	1
Journal Publicuho	1
Jurnal Mimbar Administrasi	1
As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal	1
Journal Publika	1
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan	1
Fenomena Jurnal Ilmu Sosial	1
Jurnal STIA Tabalong	1
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara	1
Total	10

P2 : Metode penelitian yang paling banyak digunakan



Gambar 2. Diagram Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Artikel.

Systematic Literature Review ini berfokus pada evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang memuat informasi mengenai nama penulis, tahun publikasi artikel, judul penelitian, metode, fokus penelitian, serta hasil temuan.

P3 : Artikel membahas tentang evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai

P4 : Dampak Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat yang menerimanya

Tabel 3. Rangkuman hasil analisis terhadap 10 artikel tentang evaluasi program BPNT.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Fokus Penelitian	Hasil/Temuan
1.	(Irawan, 2021)	Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Kualitatif dan Kuantitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pulau Aro dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Namun disamping itu, pada indikator pemerataan masih ditemukan sedikit kendala terkait ketidaktepatan sasaran karena terdapat beberapa penerima BPNT yang tidak memenuhi kriteria miskin. Sehingga secara keseluruhan, program BPNT di Desa Pulau Aro sudah berjalan baik, namun tetap membutuhkan penguatan pada aspek pendataan dan ketepatan sasaran agar manfaatnya benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
2.	(Meilani et al., 2022)	Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2022 di Desa Kalijati masih belum bisa dikatakan efektif karena 4 indikator evaluasi belum terlaksana secara optimal. Pertama dari indikator efektivitas, terdapat ketidaktepatan sasaran, di mana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar, sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru memperoleh bantuan. Kedua dari indikator efisiensi, pemerintah desa telah berupaya melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan pendamping, tetapi langkah tersebut belum cukup

					untuk mengatasi hambatan yang muncul. Ketiga dari indikator pemerataan, yang mana hanya tersedia satu e-warong di Desa Kalijati, sehingga masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mengambil bantuan. Selanjutnya dari indikator ketepatan, penyaluran BPNT kerap mengalami keterlambatan, sehingga manfaat yang diharapkan tidak selalu dirasakan tepat waktu oleh penerima.
3.	(Aziz & Wahyudi, 2023)	Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik cukup membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun masih belum sepenuhnya efektif. Dari indikator kecukupan masih belum optimal karena dengan nominal bantuan sebesar Rp 200.000, masyarakat menilai bahwa kebutuhan mereka selama satu bulan masih belum terpenuhi. Meskipun BPNT dapat meringankan beban hidup keluarga, namun manfaat yang diberikan tetap terbatas karena belum mampu memenuhi kebutuhan mereka hingga bantuan berikutnya disalurkan. Selanjutnya dari indikator responsivitas, masyarakat menilai pemberian bantuan dalam bentuk barang sebelumnya lebih bermanfaat dibandingkan bantuan tunai yang diterapkan baru-baru ini. Sehingga program BPNT di

				Kecamatan Cerme dapat dikatakan cukup berhasil, namun tetap membutuhkan perbaikan.
4.	(Sirega et al., 2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn
				Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Negeri Tawiri, Teluk Ambon, sudah berjalan cukup baik, namun belum bisa dikatakan optimal, karena 4 indikator evaluasi masih belum terlaksana dengan baik. Pertama dari indikator efektivitas belum maksimal karena penyaluran bantuan yang dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia tidak sesuai dengan tujuan awal BPNT yang berbasis non-tunai. Kedua dari indikator efisiensi, pelaksanaan program kadang tidak tepat waktu dan masih terkendala oleh masalah administrasi seperti NIK yang tidak sinkron. Selanjutnya dari indikator pemerataan dan ketepatan juga belum optimal, karena masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terdata bantuan, sedangkan masyarakat yang ekonominya sudah membaik masih tetap menerima bantuan.
5.	(Puspitasari et al., 2025)	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn
				Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Morokrembangan. dinilai cukup efektif karena mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, terutama dalam membantu meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok dan meningkatkan

					ketahanan pangan rumah tangga. Namun dari indikator efisiensi, terdapat kendala teknis, seperti kesulitan dalam mengakses lokasi penyaluran bantuan (e-warong), khususnya bagi lansia atau individu dengan keterbatasan fisik. Selanjutnya dari indikator pemerataan, kualitas barang pangan yang diterima KPM tidak selalu konsisten, sehingga butuh ruang perbaikan. Kemudian dari indikator responsivitas, undangan pencairan sering mendadak dan jadwalnya tidak pasti, sehingga menyulitkan masyarakat penerima yang sedang bekerja.
6.	(Firdaus et al., 2022)	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bengkalis telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala khususnya pada indikator pemerataan dan ketepatan yang perlu dibenahi agar pelaksanaan program lebih optimal. Pada indikator pemerataan dan ketepatan, penyaluran BPNT belum berlangsung secara merata karena terdapat penerima yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang tergolong miskin belum terdaftar dalam program.
7.	(Sihombing et al., 2023)	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Siempat Nempu Hilir sudah berjalan cukup baik dan mendapat

		Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi			respons positif dari masyarakat karena bantuan yang sebelumnya diberikan dalam bentuk bahan pangan kini dicairkan secara tunai sehingga penerima dapat menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan masing-masing. Namun disamping itu, masih terdapat kendala pada indikator ketepatan, seperti data penerima yang belum diperbarui secara rutin sehingga masih ada warga yang layak menerima tetapi belum terdaftar, sedangkan masyarakat yang sudah mampu justru tetap memperoleh bantuan. Sehingga diperlukan adanya pembaruan data dan pengawasan yang lebih konsisten agar tujuan program tercapai secara maksimal.
8.	(Susanti & Zaidanirabani, 2024)	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, namun masih belum maksimal karena adanya kendala pada beberapa indikator. Pada indikator efisiensi dan pemerataan, sebagian masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima bantuan, sedangkan sebagian masyarakat yang tergolong miskin belum terdata dalam program. Selanjutnya pada indikator kecukupan, nominal bantuan Rp 200.000 per bulan dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan

					pangan keluarga selama sebulan penuh, sehingga banyak penerima yang harus menambah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar.
9.	(Nauval & Suparti, 2025)	Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Halong pada dasarnya mampu berkontribusi positif dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program tersebut dinilai efektif karena bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima, serta proses penyaluran juga berjalan cukup efisien dan teratur, sehingga bantuan dapat diterima tepat waktu tanpa hambatan besar.
10.	(Ramadhani & Sihombing, 2024)	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat	Kualitatif	Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat masih menghadapi beberapa kendala khususnya pada indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang membuat program tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan. Pertama dari indikator efektivitas masih belum optimal karena adanya ketidaktepatan data keluarga penerima manfaat yang menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Kedua dari indikator responsivitas masih cukup lemah karena pengajuan atau penambahan nama penerima baru membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir

dari indikator ketepatan juga masih belum optimal karena masih ada warga dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik namun tetap menerima bantuan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis pada 10 jurnal diatas diperoleh hasil bahwa topik yang dibahas dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hanya saja yang membedakan yaitu lokasi penelitian yang diambil oleh masing-masing peneliti. Dari 10 jurnal tersebut juga masing-masing terindeks jurnal yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif, namun terdapat 1 penelitian yang menggunakan metode kualitatif & kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan (Irawan, 2021), sehingga dapat menggali fenomena secara mendalam. Kemudian untuk model evaluasi yang digunakan dari 10 penelitian juga sama-sama menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Meskipun topik penelitian yang diambil sama, namun setiap kajian menghadirkan perspektif dan hasil yang unik dan berbeda, disesuaikan dengan ciri khas daerah atau wilayah yang menjadi fokus penelitian.

Sejalan dengan fokus utama yang menjadi dasar penyusunan Systematic Literature Review dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa hasil sintesis yang dihasilkan mencerminkan pemahaman yang menyeluruh terhadap beragam temuan konseptual, teoretis, serta empiris yang terdapat dalam beberapa penelitian sebelumnya. Lalu hasil dari penelitian terdahulu tersebut akan dianalisis dengan menggunakan evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang terdiri dari 6 indikator sebagai berikut :

Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menunjukkan hasil yang beragam di setiap daerah. Sebagian besar penelitian mengungkap bahwa efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai daerah belum berjalan secara optimal. Program BPNT cukup efektif untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan karena bantuan yang diberikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Namun disamping itu, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas sering terkendala oleh ketidaktepatan sasaran, dimana masyarakat yang dianggap kurang mampu dan berhak untuk menerima bantuan justru tidak terdaftar, sedangkan masyarakat yang dianggap mampu justru menerima bantuan tersebut. Ketidaksesuaian data ini

dapat menyebabkan capaian hasil program tidak sepenuhnya selaras dengan target yang diharapkan. Selain itu, terdapat kendala lain juga seperti terjadinya keterlambatan pencarian bantuan. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan tingkat efektivitas, karena dengan adanya keterlambatan pencairan tersebut masyarakat tidak dapat mengatur kebutuhan pokok secara stabil. Sehingga secara keseluruhan, efektivitas program BPNT dapat dikatakan berjalan cukup baik, akan tetapi masih diperlukan adanya perbaikan khususnya pembaruan data penerima dan ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Efisiensi

Pada indikator efisiensi, beberapa penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan program BPNT sudah berjalan cukup efisien, dikarenakan penyaluran bantuan umumnya dapat diterima masyarakat tanpa adanya hambatan yang besar. Namun disamping itu, masih ditemukan juga kendala teknis yang dapat menghambat efisiensi, seperti terbatasnya fasilitas e-warong di beberapa daerah, dimana terdapat penelitian yang menyatakan bahwa di sebuah Desa hanya terdapat 1 fasilitas e-warong saja, sehingga masyarakat harus datang ke e-warong tersebut untuk mengambil bantuan, walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu, terdapat kendala lain juga terkait administratif seperti terjadinya ketidaksinkronan NIK, serta proses pembaruan data yang berjalan lambat sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data di pemerintah pusat dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efisiensi program masih belum optimal, sehingga membutuhkan adanya peningkatan koordinasi, sistem administrasi, serta infrastruktur pendukung bagi masyarakat.

Kecukupan

Pada indikator kecukupan, hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecukupan program BPNT masih menjadi persoalan yang cukup menonjol. Beberapa penerima menilai bahwa nominal bantuan sebesar $\pm$ Rp 200.000 per bulan belum mampu secara penuh memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, khususnya keluarga besar atau masyarakat yang pendapatannya tergolong rendah. Walaupun program BPNT dapat membantu meringankan beban ekonomi, namun sebagian masyarakat merasa manfaatnya hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Selain itu, terdapat kendala lain juga seperti kualitas bahan pangan yang tidak konsisten di beberapa daerah yang dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap manfaat program yang diterima. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa program BPNT memberikan kontribusi yang positif terhadap ketahanan pangan masyarakat, akan tetapi masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan harian yang bersifat terus-menerus. Sehingga, berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, kecukupan program dapat dikatakan

cukup membantu, namun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat penerima secara maksimal.

Pemerataan

Pada indikator pemerataan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa distribusi BPNT belum merata sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian menyatakan bahwa masih terdapat penerima yang tidak tepat sasaran, seperti keluarga kurang mampu yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapat bantuan tersebut. Penyebab utama permasalahan ini yaitu pendataan yang tidak diperbarui secara rutin, serta kurangnya pengawasan dalam proses verifikasi. Selain itu, sulitnya akses menuju lokasi penyaluran bantuan (e-warong) di beberapa daerah juga turut menyebabkan manfaat tidak dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat penerima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerataan program BPNT masih membutuhkan pembenahan terkait sistem pendataan, serta pemerataan infrastruktur agar manfaat program benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh kelompok sasaran.

Responsivitas

Pada indikator responsivitas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa responsivitas masyarakat terhadap program BPNT cukup beragam. Sebagian besar masyarakat penerima merasa terbantu karena dengan melalui pencairan berupa uang tunai membuat mereka lebih fleksibel dalam menyesuaikan pembelian bahan pangan sesuai kebutuhan. Akan tetapi, di beberapa daerah, justru masyarakat menilai bahwa bantuan dalam bentuk barang lebih bermanfaat karena barang yang diterima bisa langsung digunakan. Selain itu, beberapa masyarakat juga ada yang mengeluhkan terkait undangan pencairan yang mendadak dan tidak konsisten, sehingga menyulitkan masyarakat yang bekerja. Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa responsivitas program BPNT bisa dikatakan cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi melalui komunikasi yang lebih efektif, serta diperlukan adanya perbaikan mekanisme layanan kepada penerima, agar masyarakat lebih responsif, serta dapat mendukung keberlanjutan program.

Ketepatan

Indikator ketepatan menjadi salah satu indikator dengan kendala yang paling serius berdasarkan temuan dari beberapa penelitian. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa data penerima bantuan tidak diperbarui secara rutin, sehingga masih ada masyarakat mampu yang tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang dianggap kurang mampu justru tidak menerima bantuan. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa penyaluran bantuan seringkali terlambat dan tidak konsisten, sehingga hal tersebut membuat program tidak

tersalurkan tepat waktu. Selain itu, mekanisme penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan awal, seperti penyaluran bantuan secara tunai pada program yang seharusnya berbasis non tunai juga menjadi masalah dalam indikator ketepatan. Hasil dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan program BPNT masih perlu dilakukan perbaikan terutama pada sistem administrasi, pembaruan data, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 10 jurnal yang ditelaah, sama-sama membahas evaluasi kebijakan Program BPNT, namun yang membedakan yaitu lokasi penelitian, jenis indeks jurnal, serta metode yang digunakan. Meskipun topiknya serupa, namun setiap penelitian menghadirkan perspektif dan temuan yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan fokus *Systematic Literature Review*, dari penelitian terdahulu tersebut dilakukan analisis berdasarkan 6 indikator evaluasi kebijakan menurut William N Dunn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pada indikator Efektivitas, program BPNT dapat dikatakan berjalan cukup baik, namun masih diperlukan adanya perbaikan khususnya dalam perbaikan data masyarakat penerima dan ketepatan waktu penyaluran bantuan. Kedua, pada indikator Efisiensi, program masih belum optimal, sehingga membutuhkan adanya peningkatan koordinasi, sistem administrasi, serta infrastruktur pendukung bagi masyarakat. Ketiga, dari indikator Kecukupan, program BPNT memberikan kontribusi yang positif terhadap ketahanan pangan masyarakat, akan tetapi masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat penerima secara maksimal. Keempat, pada indikator Pemerataan, distribusi BPNT belum merata sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan masih membutuhkan pembenahan terkait sistem pendataan, serta pemerataan infrastruktur agar manfaat program benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran. Kelima, pada indikator Responsivitas, program BPNT bisa dikatakan cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi melalui komunikasi yang lebih efektif, serta diperlukan adanya perbaikan mekanisme layanan kepada penerima. Dan yang keenam, pada indikator Ketepatan, program BPNT masih perlu dilakukan perbaikan terutama pada sistem administrasi, pembaruan data, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, M. L. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Evaluasi bantuan pangan non tunai di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 6(4), 1208–1219. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251>
- Firdaus, A., Sujianto, & Yuliani, F. (2022). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis: Suatu evaluasi. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 113–123. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.36>
- Irawan, D. (2021). Evaluasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 2(2).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas* (Cet. ke-1). UNG Press.
- Kiswanto, E. (2021). Implementasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 129–144. <https://doi.org/10.31105/jpks.v20i2.2584>
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1). <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.433>
- Meilani, M. T., Sihabudin, A. A., & Budiawan, A. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai tahun 2022 dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 2(2).
- Musdary, F., Amalia, L., Lubis, R. M. A., & Ningsih, W. (2021). Systematic review: Efektivitas *Ideonella sakaiensis* dan *Chlamydomonas reinhardtii* sebagai agen biodegradasi plastik berbahan dasar PET. *Jurnal Biolokus: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi*, 4(1), 20–26. <https://doi.org/10.30821/biolokus.v4i1.901>
- Nauval, M., & Suparti, H. (2025). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal STIA Tabalong*, 8(1). <https://doi.org/10.35722/japb>
- Nurjanah, I., Rosyidah, N. S., Mardiana, T., & Maryanto, H. (2024). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non-tunai melalui goal-oriented evaluation model di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.14420/3qn9y669>
- Octavia, R. D., Pikahulan, R. M., & Pangestu, D. R. (2022). Penyaluran BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif hukum ekonomi Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 1–19. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3261
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang program bantuan pangan non tunai. (2023).
- Puspitasari, I., Retno, D. P., Auliazaki A, S., & Valonika A, T. N. (2025). Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i1.436>

- Ramadhani, & Sihombing, R. S. M. (2024). Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) pada masyarakat kurang mampu di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.25157/dak.v11i1.13705>
- Sihombing, F., Pasaribu, V. A., & Degedona, L. P. (2023). Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 9(4).
- Sirega, L. K., Pattimukay, H. V. R., & Waisapy, J. (2023). Evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20(1). <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.662>
- Susanti, T. D., & Zaidanirabani, D. N. (2024). Evaluasi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. *JAPRI (Jurnal Administrasi Publik Riset Inovatif)*, 1(1), 11–19. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/japri/article/view/11315>
- Watajdid, N. I., Lathifah, A., Andini, D. S., & Fitroh. (2021). Systematic literature review: Peran media sosial terhadap perkembangan digital marketing. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 20(2), 163–179. <https://doi.org/10.14710/jspi.v20i2.163-179>